

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komite Sekolah memang cukup kuat karena dasar hukumnya telah termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2003. Komite Sekolah merupakan badan mandiri untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Secara empiris, saling keterikatan antara sekolah, keluarga dan masyarakat juga dapat dirasakan kepentingannya.¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite sekolah mengembangkan empat peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya. Untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dibentuklah suatu wadah yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, penertaan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan pendidikan, jalur pendidikan satuan pendidikan maupun jalur pendidikan luar satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder

¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (UU SPN No.20/2003) Pasal 56

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dari hasil pendidikan.²

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar suatu organisasi masyarakat di satuan pendidikan mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas satuan pendidikan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai organisasi masyarakat di satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.³

Namun demikian kehadiran Komite Sekolah yang fakta di lapangan masih menunjukkan justru keberadaannya dianggap sebagai masalah baru bagi orangtua siswa karena menjadi actor utama di balik mahal nya biaya sekolah. Keberadaannya sekadar menstempel setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama untuk menarik dana dari orangtua siswa. Salah satu tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah untuk meningkatkan tanggung jawab dan juga peran aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka

² Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2006), h. 37

³ Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2007), Cet. I, h. 62.

meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat bukan hanya sekedar memberikan bantuan yang berwujud finansial ataupun materi saja, namun masyarakat diharapkan juga dapat memberikan support dengan cara ikut sama-sama memberikan gagasan, pemikiran, saran serta kritikan untuk kemajuan sekolah. Dari berbagai pengalaman dan kenyataan-kenyataan ternyata dalam pelaksanaan peran Komite Sekolah tidak mudah. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama dimana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tidak menghiraukan keinginan dari masyarakat sekitarnya. Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki.⁴

Komite Sekolah disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran Komite Sekolah dan ketidak berdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran Komite Sekolah tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan strategis, yakni (1) memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan

⁴ Jurnal Nurbaeti1, 2Happy Fitria, 3Yessi Fitriani 1SDN 176 OKU Kec Sinar Peninjauan, 2,3Universitas PGRI Palembang e-mail: nurbaetibta16@gmail.com

masyarakat di satuan pendidikan.⁵ Dengan demikian keberadaan Komite Sekolah semestinya dapat berkontribusi untuk menghadirkan pelayanan terbaik dari sisi manajemen sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, akan tetapi pada kenyataannya tidak banyak Komite Sekolah yang dapat berperan sebagaimana mestinya.

Hal ini pula yang terjadi di berbagai sekolah di Kabupaten Subang, salah satunya adalah SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang yang masih menganggap Komite Sekolah adalah suatu lembaga yang sama dengan lembaga sebelumnya. Kalau dihitung mulai dari terbitnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Komite Sekolah, maka Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah berusia kurang lebih sembilan tahunan. Melalui program sosialisasi, pengembangan, dan kemudian pembinaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Mandikdasmen, hasilnya dapat kita ketahui sebagai berikut:

1. Hampir semua kabupaten/kota di Indonesia telah terbentuk Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Separuh provinsi di Indonesia secara mandiri telah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi.
3. Hampir semua satuan pendidikan telah membentuk Komite Sekolah
4. bagaimana pun juga Dewan Pendidikan Nasional sampai saat ini memang belum terbentuk.

Hal ini terkait dengan soal jumlah atau kuantitatif. Jika secara kuantitatif kondisinya cukup membanggakan, namun secara kualitatif memang masih sangat

⁵ Supriadi, Agus. 2017. “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan”. Vol. 01 No. 02. April 2017. hal. 147-148.

memprihatinkan.⁶

Dalam keterangan di atas telah dijelaskan bahwa hampir semua satuan pendidikan telah terbentuk Komite Sekolah. Itu memang benar sekali. Namun kondisi itu sama sekali tidak melegakan hati kita. Pada awalnya proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara instan. Kalau ada Komite Sekolah yang dibentuk dengan model pemilihan formatur, maka itu masih lumayan. Yang sering terjadi adalah justru Komite Sekolah yang dibentuk dengan cara penunjukan oleh kepala sekolahnya. Inilah kondisi Komite Sekolah yang ada dan kita kenal sampai saat ini, yakni sebagai Komite Sekolah stempel. Ade Irawan, Sekretaris Koalisi Pendidikan melihat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab komite tidak mampu menjalankan fungsi sebenarnya, yaitu: "Pertama, buruknya sosialisasi. Kedua, minimnya pemahaman guru dan orangtua siswa. Ketiga, komite dibentuk kepala sekolah".⁷ Untuk melihat lebih jauh kondisi di lapangan penulis mengadakan studi pendahuluan di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan tidak ada program kerja yang harus mereka laksanakan, memerankan peran dan fungsinya, karena program kerja komite sekolah masih ikut dalam program kerja sekolah hal ini akan menyebabkan tidak berdayanya peran komite sekolah sebagai organisasi yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Komitmen UU yang telah diamatkan terhadap pemerintah tersebut tentunya perlu didukung. Hanya perlu diingat, untuk memajukan mutu pendidikan tidak cukup diandalkan dengan alokasi dana yang besar saja. Kalau tidak dibarengi

⁶ Suparlan, "Komite Sekolah: Kondisi, Masalah dan Tantangan di Masa Depan", dari <http://www.suparlan.com/pages/posts/komite-sekolah-kondisi-masalah-dan-tantangan-di-masa-depan237.php> tanggal 20 Nopember 2010

⁷ Forum Wartawan Peduli Pendidikan, Kilas Balik Pendidikan Nasional 2006. h. 109-110.

dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang benar, serta dikelola orang-orang yang benar, maka jelas akan tidak efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan karena, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkenaan dengan; “pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah”.⁸

Tentu saja Komite Sekolah ini mesti diawali dengan melakukan upaya optimalisasi orang tua siswa di sekolah. Upaya ini menjadi sangat penting di saat keadaan budaya dan gaya hidup generasi kita sudah mulai tidak jelas sekarang ini. Dengan adanya upaya ini jalinan antara satu sisi, orang tua, dan sisi lain sekolah, bisa bersama-sama mengantisipasi dan mengarahkan serta bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di usia sekolah.

Hal ini terungkap dari hasil observasi peneliti yang dilakukan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang, yang menemukan bahwa keberadaan komite sekolah justru jauh berbeda dengan konsep atau teori yang ada. Yang mana keberadaan komite sekolah sebagai jembatan antara masyarakat dan sekolah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat, misalnya dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah tanpa pertimbangan dan dukungan dari komite sekolah sebagai kontrol dan mediator antara institusi di satuan pendidikan dan masyarakat. Untuk itu penelitian ini bermaksud menjawab bagaimana

⁸ Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 43

kontribusi komite sekolah dalam meningkatkan manajemen dan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang. Adapun yang menjadi alasan di pilihnya lokasi penelitian; *Pertama*, karena layanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang belum optimal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas sekolah. *Kedua* Komite SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang hanya sebagai formalitas dan sebagai legitimator bagi program-program yang diajukan oleh kepala SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang

Dengan demikian, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Melihat realitas tersebut penulis merasa perlu mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam Tesis dengan judul **“KONTRIBUSI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI SDIT AL-HIDAYAH KABUPATEN SUBANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Ketidakkompakan pihak sekolah dengan komite sekolah dalam menjalankan program-programnya.
2. Komite sekolah sering dianggap tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan layanan pendidikan.
3. Adanya Ketidaktahuan mengambil kebijakan di sekolah
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota komite sekolah yang ada di sekolah.
5. Banyaknya hambatan yang dihadapi komite sekolah untuk berperan aktif

dalam proses peningkatan layanan pendidikan di sekolah.

6. Kurangnya perhatian satuan pendidikan dan komite sekolah terhadap pengembangan layanan pendidikan.

C. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang tercantum pada identifikasi masalah, penulis melihat perlu melakukan pembatasan masalah. Hal itu dilakukan agar permasalahan tidak menimbulkan kerancuan, maka masalah penelitian menjadi sebagai berikut:

1. Komite sekolah sering dianggap tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan layanan pendidikan.
2. Kurangnya perhatian Komite Sekolah terhadap peningkatan layanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang?
2. Bahaimana penerapan manajemen komite sekolah di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.

2. Mengetahui penerapan manajemen komite sekolah di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik penelitian diharapkan berguna untuk:
 - a) Mengembangkan teori manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.
 - b) Memperkaya referensi keilmuan pendidikan dan sumber informasi dan kajian akademik.
 - c) Pengembangan penelitian di bidang manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.
2. Secara Praktis Kegunaan penelitian adalah:
 - 1) Bagi peneliti agar dapat menambah wawasan keilmuan tentang manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.
 - 2) Bagi sekolah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap penerapan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.
 - 3) Bagi komite sekolah dapat dijadikan masukan dan saran sebagai

referensi terkait penerapan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDIT Al-Hidayah Kabupaten Subang.

